

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan inklusif menjadi lebih dikenal sejak adanya krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan bahwa krisis tersebut berdampak pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76 tahun 2016 demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Keuangan inklusif hadir untuk menghilangkan segala hambatan dalam mengakses ataupun menggunakan berbagai produk dan layanan perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif memiliki beberapa aspek untuk mencapai keuangan inklusif. Adapun untuk membuat strategi nasional perlu melihat beberapa aspek seperti adanya sarana layanan yang sesuai, produk yang sesuai, serta keuangan yang responsif melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Berdasarkan aspek tersebut, Indonesia membuat strategi yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Strategi tersebut berisi pedoman langkah strategis lembaga keuangan guna membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan antar individu dan antar daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 menyatakan bahwa inklusi keuangan adalah kebijakan yang berperan dalam peningkatan stabilitas sistem keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung penurunan tingkat kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Strategi ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengembangkan kerangka umum keuangan inklusif yang terdiri dari enam pilar antara lain pendidikan keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan penunjang, fasilitas perantara dan saluran distribusi, dan terakhir perlindungan konsumen. Enam pilar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan dan juga memperluas jangkauan lembaga keuangan agar dapat dirasakan berbagai lapisan masyarakat (OJK, 2017).

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Keuangan inklusif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keuangan inklusif Indonesia meningkat cukup tajam. Pada 2016 tercatat tingkat keuangan inklusif Indonesia sebesar 69 persen dan pada 2019 tercatat sebesar 76.20 persen. Namun jika melihat negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, indeks keuangan inklusif Indonesia masih tertinggal. Berdasarkan survei *Global Financial Index* tahun 2017, tingkat kepemilikan rekening di Singapura adalah sebesar 98 persen, Thailand sebesar 82 persen, dan Malaysia sebesar 85 persen. Oleh sebab itu, Presiden menargetkan Indonesia pada 2024 memiliki indeks keuangan inklusif lebih dari 90 persen. Pada 2020, kepemilikan akun penduduk dewasa pada lembaga keuangan formal adalah 55,7 persen, jumlah ini meningkat cukup tinggi dibandingkan data 2014 yang hanya sebesar 31,30 persen.

Strategi nasional keuangan inklusif memiliki beberapa tujuan antara lain membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak kebijakan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat menjamin bahwa masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sama sehingga belum tentu berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Selain itu, ketimpangan yang tinggi juga berdampak pada stabilitas sosial dan politik yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan (Ali dan Hyun, 2007). Dengan demikian, target makro ekonomi suatu negara seharusnya lebih diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu suatu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan suatu negara tetapi juga dapat menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Amalina *et.al*, 2013).

Konsep pertumbuhan ekonomi inklusif pertama kali diperkenalkan oleh *Asian Development Bank* (ADB). Proses pertumbuhan ekonomi inklusif telah dilakukan di berbagai negara salah satunya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi inklusif memberikan kualitas kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam proses pertumbuhan (Anand *et.al* 2013). Konsep ini juga menekankan bahwa peluang ekonomi yang diciptakan oleh pertumbuhan harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Berbagai konsep yang ditawarkan untuk merumuskan pertumbuhan

inklusif memiliki pandangan masing-masing mengenai bagaimana seharusnya pertumbuhan dapat bekerja dalam perekonomian. Ketimpangan, kemiskinan, masalah sektoral dan tenaga kerja seringkali disebutkan sebagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia terindikasi mengalami peningkatan dapat dilihat dari adanya kebangkitan ekonomi dari masyarakat menengah (Amalina *et.al*, 2013). Namun, masyarakat kelompok menengah masih didominasi oleh masyarakat miskin yang menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pertumbuhan masyarakat kelas menengah kebawah. Hal tersebut dapat membuat kesenjangan ekonomi yang semakin parah. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif agar dapat menurunkan tingkat kesenjangan.

Berdasarkan kondisi di atas, maka penelitian untuk melihat seberapa besar keuangan inklusif dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia menjadi penting dilakukan. Pada penelitian ini, indikator keuangan inklusif yang digunakan adalah jumlah kantor cabang bank, rasio tabungan dan kredit per PDRB, dan DPK per penduduk dewasa. Variabel kontrol pada penelitian ini menggunakan rata-rata lama sekolah sedangkan pertumbuhan ekonomi inklusif menggunakan logaritma selisih PDRB per kapita.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian mengenai keuangan inklusif telah banyak dilakukan di Indonesia dan di negara lainnya. Di Indonesia, penelitian terdahulu lebih membahas terkait pengaruh keuangan inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi (Anwar *et.al*, 2016 dan Purwiyanta *et.al*, 2020) serta kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia bagian timur (Erlando *et.al*, 2020). Sedangkan penelitian luar negeri yang membahas tentang keuangan inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif seperti Olarewaju Afolabi *et.al* (2020) yang menggunakan variabel kredit pedesaan, kantor cabang bank, dan tingkat likuiditas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian Olarewaju menyimpulkan layanan keuangan yang tersebar merata dapat meningkatkan produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi inklusif, hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian Dixit dan Gosh (2013). Penelitian Zulfiqar *et.al* (2016) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan dan kesetaraan gender merupakan

faktor penting dari inklusi keuangan. Penelitian Kim *et.al* (2020) menguji kausalitas keuangan inklusif dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI dengan menggunakan uji kausalitas panel Granger.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya menggunakan indeks keuangan inklusif untuk menggambarkan inklusi keuangan, penelitian ini akan menguji dan menganalisis pengaruh keuangan inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia pada 2010-2019. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi inklusif dan variabel independen jumlah kantor cabang bank, DPK per penduduk dewasa, dan rasio tabungan kredit per PDRB yang mewakili keuangan inklusif dan variabel rata-rata lama sekolah sebagai variabel kontrol. Kemudian, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis regresi data panel untuk menganalisis pengaruh keuangan inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di 34 provinsi di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh dan hubungan kantor cabang bank, dana pihak ketiga, dan rasio tabungan kredit per PDRB dan rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Model tersebut terpilih setelah melalui *Chow test*, *LM test*, dan *Hausman test*. Penelitian ini juga menguji asumsi klasik dari hasil estimasi yang diperoleh. Setelah melalui uji multikolinieritas, heteroskesastisitas, dan autokorelasi, hasil estimasi menunjukkan tidak terdapat ketiga masalah tersebut sehingga hasil yang diperoleh layak untuk diinterpretasikan.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki hasil bahwa keuangan inklusif yang digambarkan dengan variabel DPK per penduduk dewasa dan rasio tabungan kredit per PDRB sebagai dimensi *accessibility* dan *usage* dari keuangan inklusif memiliki berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Sedangkan variabel jumlah kantor cabang bank mewakili dimensi *availability* tidak berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil tersebut disebabkan adanya digitalisasi perbankan dimana layanan perbankan dapat diakses melalui *mobile banking* maupun *internet banking* sehingga masyarakat tidak perlu ke kantor cabang bank untuk melakukan transaksi. Variabel kontrol rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada ketiga model. Hal tersebut menandakan bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan di Indonesia maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

1.6 Kontribusi riset

Penelitian ini akan mengembangkan penelitian sebelumnya yang melihat pengaruh keuangan inklusif terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pada penelitian ini akan melihat pengaruh keuangan inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya berfokus pada pendapatan tetapi juga ketimpangan dan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan tiga model berbeda dimana variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi inklusif dan model 1 menggunakan variabel independen rasio tabungan dan kredit terhadap PDRB yang mewakili dimensi *usage* dari inklusi keuangan. Kemudian, model 2 menggunakan variabel independen DPK per penduduk dewasa sebagai dimensi *accessibility* dan model 3 menggunakan variabel jumlah kantor cabang bank mewakili dimensi *availability* dari inklusi keuangan. Ketiga model tersebut menggunakan variabel kontrol rata-rata lama sekolah untuk dapat menangkap pengaruh keuangan inklusif yang dilihat dari indikator keuangan inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di 34 provinsi di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ringkasan hasil penelitian, kesenjangan, penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka memuat teori yang relevan dengan berupa landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan terkait metode penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum terkait variabel yang digunakan dalam penelitian, deskripsi statistik penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis, dan intepretasi dan pembahasan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat beberapa kesimpulan dari bab pembahasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya dan untuk pengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN